

# **“Banking” Weekly Hotlist (28 Agustus – 1 September 2017)**

---

## **KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL & MONETER**

### **BI Mungkin Akan Aturan LTV di Sejumlah Wilayah Lebih Ketat**

Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk memperketat aturan rasio kredit terhadap nilai agunan atau Loan to Value (LTV) di sejumlah wilayah. Hal ini sejalan dengan wacana BI yang akan menerapkan skema LTV berdasarkan wilayah (spasial). Jika dimungkinkan, BI akan menerapkan kebijakan tersebut di 2017. Selama ini, kebijakan LTV ditetapkan sama secara nasional untuk dua sektor yakni sektor properti dan otomotif. Artinya, dengan kebijakan itu, bisa saja besaran kredit properti dan otomotif berbeda di setiap wilayah. BI sendiri juga sudah mengajak diskusi para pelaku industri perbankan terkait dengan relaksasi kebijakan LTV berdasarkan wilayah. Dalam diskusi yang sudah dilakukan BI dengan perbankan yakni terkait dengan masukan dan pandangan dari wacana kebijakan makroprudensial tersebut.

Rencana pelonggaran kebijakan LTV tersebut didasari atas kondisi perkembangan industri properti dan otomotif yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Hal itu sama dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda di tiap wilayahnya. Selain itu, wacana Bank Sentral terkait dengan relaksasi aturan LTV tersebut dilakukan agar perbankan mampu mengelola ketersediaan dana kreditnya dan memperluas pemberian kredit kepada masyarakat agar konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik sampai akhir tahun. Namun demikian, kajian perubahan aturan LTV ini akan tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi ke depan, baik dari sisi global maupun domestik. Untuk domestik, salah satu yang dipertimbangkan adalah laju inflasi. Di mana berdasarkan target BI, inflasi dipatok kisaran 4 persen plus minus 1 persen di 2017 ini

(Sumber: Infobank, 28 Agustus 2017)

# Saatnya Bank Turunkan Suku Bunga Kredit

Bank Indonesia (BI) menilai perbankan sudah saatnya menurunkan suku bunga kreditnya yang sampai saat ini masih lambat penurunannya dalam merespon suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate yang sudah turun sebanyak 175 basis points (bps) sejak awal 2016 sampai dengan Agustus 2017. Kondisi rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) yang sudah mulai menurun menjadi alasan kuat bagi bank untuk segera menurunkan suku bunga kreditnya. Sejak NPL mengalami peningkatan pada 2016, saat ini kondisi NPL dinilai sudah mencapai puncaknya (*peak*) sehingga bisa lebih baik.

Berdasarkan catatan BI, saat ini rasio NPL berada pada level 3% atau sudah lebih baik bila dibandingkan dengan posisi paling tinggi pada Mei 2017 yang sebesar 3,07%. Sementara itu, BI mencatat jika level *loan at risk* sudah membaik dari level 11,1% pada Juni 2017 menjadi 10,9% pada Juli 2017. Ruang penurunan suku bunga bank juga lebih terbuka dengan pelonggaran suku bunga acuan oleh BI. Dengan penurunan suku bunga ini, Bank Sentral berharap jika pertumbuhan kredit perbankan bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu permintaan kredit dari masyarakat maupun korporasi juga meningkat.

(Sumber: Infobank, 28 Agustus 2017)

---

## SISTEM PEMBAYARAN

### Visa: Kesadaran Masyarakat Akan Transaksi Nontunai Meningkat

Perusahaan teknologi pembayaran global, PT Visa Worldwide Indonesia merilis Consumer Payment Attitudes Study 2016, sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa saat ini 80% masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan kartu pembayaran elektronik dibandingkan dengan uang tunai. Berdasarkan survei yang dilakukan Visa, jumlah masyarakat yang lebih suka menggunakan kartu pembayaran itu meningkat dari 69% pada 2015. Dari hasil penelitian itu juga didapati bahwa saat ini 34% responden di Indonesia hanya membawa sedikit uang tunai dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Jumlah masyarakat yang mengandalkan uang tunai juga semakin berkurang dari 31% di 2015 menjadi 20% di 2016. Selain itu, sekitar 53%

responden mengakui bahwa saat ini mereka memiliki lebih banyak kartu pembayaran dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Tren non tunai didorong oleh konsumen yang semakin menginginkan alat bayar yang aman, cepat, dan tanpa kendala. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa masalah keamanan merupakan salah satu penyebab masyarakat berpindah ke seperti kartu debit, kredit, ATM, dan uang elektronik.

Metode pembayaran di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam 10 tahun terakhir. Inovasi teknologi baru, akses internet yang semakin luas, serta semakin banyaknya masyarakat yang memiliki perangkat mobile merupakan hal yang mendorong perkembangan pesat dalam melakukan transaksi pembayaran. Pertumbuhan smartphone di Indonesia juga menjadi pendorong pertumbuhan perdagangan online. Dalam penelitian tersebut, 82% responden mengakui bahwa mereka menggunakan smartphone untuk berbelanja dan sekitar 47% responden menggunakan smartphonenya setiap minggu. Pengguna smartphone tersebut terdiri dari 88% konsumen Generasi Y dan 73% konsumen Generasi X. Pada dasarnya, konsumen saat ini mulai berpaling ke pembayaran mobile sebab lebih mudah, nyaman dan dapat melakukan pembelian di mana saja dan kapan saja.

Selanjutnya, penelitian tersebut menyatakan bahwa on-demand services (layanan berbasis permintaan) sebuah layanan yang diciptakan oleh perusahaan teknologi dalam rangka memenuhi permintaan konsumen dengan menyediakan barang dan jasa dengan cepat saat ini mengalami peningkatan yang pesat. Sedikitnya 65% masyarakat Indonesia mengaku pernah menggunakan on-demand services yang disediakan oleh Gojek, Uber, dan Grab untuk memesan taksi, memesan tiket perjalanan, mengantarkan makanan, dan berbelanja.

(Sumber: Infobank, 29 Agustus 2017)

---

## **KINERJA PERBANKAN**

### **4 Bank BUMN Tandatangani Komitmen Holding**

Empat bank besar plat merah, yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN)

menyatakan komitmennya untuk implementasi inisiatif *holding* perbankan dan jasa keuangan. Komitmen tersebut ditandatangani oleh masing-masing pemimpin perusahaan seperti Suprajarto (BRI), Kartika Wirjoatmodjo (Mandiri), Achmad Baiquni (BNI) dan Maryono (BTN). Selain itu, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo turut meneken komitmen tersebut.

Komitmen tersebut tidak hanya ditandatangani empat bank BUMN itu saja. Beberapa perusahaan BUMN lainnya di sektor jasa keuangan yang menandatangani komitmen ini diantaranya Danareksa, Pegadaian, Bahanana dan PNM. Total ada delapan perusahaan BUMN yang menandatangani komitmennya untuk implementasi inisiatif *holding* perbankan dan jasa keuangan.

(Sumber: Infobank, 30 Agustus 2017)

## **Salurkan KUR Rp 193 Triliun**

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, hingga semester I 2017 Bank BUMN sudah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp193 triliun atau 87 persen dari total penyaluran KUR secara nasional yakni Rp222,28 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih memiliki porsi paling besar dari segi penyaluran KUR yakni tercatat 149,38 triliun di semester I 2017. Kemudian disusul oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah menyalurkan KUR hingga semester I 2017 yang sebesar Rp24,24 triliun. Selanjutnya PT Bank Negara Indonesia (BNI) yang di sepanjang semester I 2017 juga menyalurkan KUR hingga Rp19,05 triliun.

Sementara untuk Bank-Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah menyalurkan KUR di semester I 2017 sebesar Rp24,96 triliun atau hanya 11 persen dari total penyaluran KUR secara nasional yang mencapai sebesar Rp222,28 triliun.

Sementara dari sisi penjaminan KUR sampai dengan akhir semester I tahun ini, tercatat mencapai Rp194,43 triliun yang terdiri dari 2,76 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 28,85 juta tenaga kerja yang telah dijamin oleh perusahaan penjamin.

(Sumber: Infobank, 29 Agustus 2017)

---

\*\*\*